

Implementasi Program Pendidikan Inklusi di Sekolah Alam Banyu Belik Kedung Banteng

Dhien Kuntari¹, Muhammad Raihan¹, Tsalyatul Lutfiah¹, Uswatun Khasanah¹

¹UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia

✉ kuntaridhien303@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 3, 2024

Revised May 15, 2024

Accepted June 17, 2024

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pembelajaran. Konsep ini sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang menjunjung akses pendidikan tanpa diskriminasi. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia didasari oleh regulasi pemerintah, seperti Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32. Sekolah Alam Banyu Belik menerapkan konsep pendidikan inklusif dengan mengintegrasikan kurikulum 2013, kurikulum merdeka, dan kurikulum adaptif yang disebut "kurikulum singkong". Program ini melibatkan alam sebagai media dan sumber belajar utama, serta mengembangkan keterampilan hidup yang berwawasan lingkungan. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, penerimaan dan sikap masyarakat, serta kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa upaya berikut bisa dilakukan seperti, pelatihan dan pendampingan guru, pengadaan fasilitas aksesibel, sosialisasi kepada masyarakat, advokasi kebijakan, dan pembentukan unit layanan disabilitas. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kompetensi guru, kerjasama antar pemangku kepentingan, dan transformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan

Kata kunci: Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus, Kurikulum Adaptif.

Abstract

Inclusive education is an educational system that accommodates all students, including children with special needs, to learn together in one learning environment. This concept is in line with the Indonesian national education philosophy that upholds access to education without discrimination. The implementation of inclusive education in Indonesia is based on government regulations, such as the Ministerial Decree No. 70 of 2009 and Law No. 20 of 2003 Article 32. Banyu Belik Nature School implements the concept of inclusive education by integrating the 2013 curriculum, the independent curriculum, and the adaptive curriculum called the "cassava curriculum". This program involves nature as the main learning medium and source, as well as develops life skills with an environmental awareness. However, there are several challenges in its implementation, such as the readiness of human resources, supporting facilities and infrastructure, public acceptance and attitudes, and policies that are not yet fully supportive. Efforts that can be made to overcome these challenges include training and mentoring for teachers, procurement of accessible facilities, public outreach, policy advocacy, and the establishment of a disability service unit. The success of inclusive education heavily depends on teacher competencies, collaboration among stakeholders, and a comprehensive transformation within the education system.

Keywords: Inclusive Education, Children With Special Needs, Adaptive Curriculum.

A. Pendahuluan

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang terbuka bagi semua anak, tanpa terkecuali. Berbeda dengan persepsi umum yang sering mengasosiasikannya dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif sesungguhnya mencakup semua anak dengan beragam karakter dan latar belakang. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas dalam satu lingkungan belajar yang aman dan suportif, terlepas dari kondisi fisik, sosial, emosional, budaya, maupun bahasa mereka. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta mendorong setiap anak untuk mencapai potensi terbaiknya dalam belajar dan berkembang. (Budi Utomo, 2024)

Sejak diberlakukannya keputusan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif merupakan tonggak penting dalam mewujudkan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi semua anak. Peraturan ini menegaskan hak setiap peserta didik, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah terdekat dengan tempat tinggal mereka. serta konsep sekolah inklusi mulai diperkenalkan. Pasal 1 keputusan tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan inklusif merupakan system penyelenggaraan Pendidikan yang membuka kesempatan bagi semua peserta didik, baik yang memiliki kelainan/keterbatasan maupun yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat Istimewa., untuk mengikuti Pendidikan pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya. (Supena, 2023)

Sekolah inklusi hadir untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak- anak berkebutuhan khusus, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Di sekolah inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan belajar bersama dengan teman sebaya mereka di kelas reguler, di mana mereka diperlakukan dengan setara dan dihargai atas keragamannya. Hal ini membawa dampak positif bagi kondisi psikologis anak berkebutuhan khusus, meningkatkan rasa percaya diri, dan mendorong inklusi sosial. Namun, setelah lebih dari satu dekade, pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu yang utama adalah keterbatasan kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus di kelas reguler. Kurangnya pelatihan dan dukungan bagi guru dalam memahami kebutuhan belajar yang beragam dan menerapkan strategi pengajaran yang inklusif menjadi hambatan dalam mewujudkan potensi penuh pendidikan inklusi. Keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi berbagai pihak. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi kunci utama. Di samping itu, kerjasama yang erat antara pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah juga esensial untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif bagi semua anak.

Dengan komitmen dan upaya bersama, diharapkan tantangan-tantangan ini dapat diatasi dan pendidikan inklusi di Indonesia dapat mencapai tujuannya, yaitu memberikan kesempatan belajar yang setara dan berkualitas bagi semua anak, tanpa terkecuali. (Elsa Agustina, 2023)

Pada tahap ini terlihat bahwa konsep pendidikan inklusif sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang menekankan pada akses pendidikan yang luas dan merata bagi seluruh anak bangsa. Pendidikan inklusif memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas, terlepas dari kondisi awal dan latar belakangnya. Oleh karena itu, Pendidikan inklusif bukan hanya tentang menampung anak berkebutuhan khusus di kelas reguler, melainkan tentang menciptakan sistem pendidikan yang terbuka bagi semua anak, tanpa diskriminasi. Sekolah inklusif menyediakan lingkungan belajar yang aman dan suportif bagi semua anak, di mana setiap anak dihargai dan dihormati atas keragamannya. Lebih dari sekadar tempat duduk di kelas, pendidikan inklusif menekankan pada adaptasi kurikulum, metode pengajaran, dan dukungan individual untuk memastikan setiap anak dapat mencapai potensi terbaiknya. Guru-guru di sekolah inklusif dilatih untuk memahami dan memenuhi kebutuhan belajar yang beragam, dan mereka bekerja sama dengan orang tua dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Semangat pendidikan inklusif adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk belajar dan berkembang, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan mereka. Pendidikan inklusif bukan hanya bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi semua anak di kelas, karena mereka belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan. (Fransiska Angelina Dhoka, 2023)

Terkait dengan karakteristik pendidikan Inklusif Direktorat Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional (2004:15) menjelaskan empat ciri utama pendidikan inklusif, yaitu 1) Proses yang Berkelanjutan, Pendidikan inklusif merupakan proses yang terus berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap individu; 2) Menangani Kesulitan Belajar, Pendidikan inklusif fokus pada penyediaan berbagai strategi dan dukungan untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar; 3) Partisipasi dan Pembelajaran Bermakna, Pendidikan inklusif memastikan semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan mereka; 4) Memenuhi Kebutuhan Anak-anak Tertinggal, Pendidikan inklusif dirancang untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dari latar belakang kurang mampu, terpinggirkan, dan membutuhkan dukungan belajar tambahan. (Nazar, 2020)

Pada observasi awal dilakukan di Sekolah Alam Banyu Belik mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan program pendidikan inklusif, diantaranya yaitu 1) Keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK), jumlah GPK yang tidak mencukupi untuk memberikan dukungan yang memadai bagi siswa berkebutuhan khusus (ABK); 2) Minimnya Kompetensi Guru dalam Layanan Pembelajaran ABK, Kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam menangani kebutuhan belajar yang beragam dari ABK; 3) Latar Belakang Pendidikan Guru yang Berbeda, variasi latar belakang pendidikan guru yang dapat menimbulkan perbedaan dalam pendekatan dan metode pengajaran; 4) Beban administrasi dan tugas tambahan, Guru dibebani dengan tugas administrasi dan tugas tambahan yang dapat menyita waktu dan energi mereka dari fokus utama pada pembelajaran; 5) Komunikasi antara guru dan orang tua yang kurang optimal, Kurangnya komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua ABK, yang dapat menghambat proses pembelajaran dan dukungan. Meskipun guru di Sekolah Alam Banyu Belik

Kedung Banteng memiliki banyak tantangan, bukan berarti hal tersebut harus menjadi beban dan alat penghalang untuk tetap mengajar anak-anak ABK. Mereka tetap bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang telah diembannya.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik wawancara dan observasi lapangan, dimana melalui wawancara atau disebut dengan istilah Enquiring, atau teknik pengumpulan data melalui pertanyaan, dari sini peneliti menggali informasi dari subjek atau sampel penelitian terkait kebijakan dan pelaksanaan program pendidikan inklusi di Sekolah Alam Banyu Belik Kedung Banteng. Teknik ini dilakukan melalui wawancara tatap muka (yang paling umum dan efektif), tes, atau angket. Wawancara membutuhkan komunikasi langsung untuk membangun pemahaman yang lebih baik, sedangkan tes dan angket menggunakan daftar pertanyaan tertulis untuk dijawab secara mandiri. Dan observasi lapangan atau Experiencing, atau teknik pengumpulan data melalui pengalaman, menggunakan observasi untuk mengumpulkan informasi. Observasi adalah metode mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena dari objek yang diamati. Dalam teknik ini, peneliti terlibat langsung dalam pengalaman yang ingin dipelajari dan mengamati secara langsung apa yang terjadi (Ahlan Syaeful Millah, 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah Alam Banyu Belik Kedung Banteng mengenai data anak berkebutuhan khusus disebutkan bahwa jika merujuk kepada data dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada tahun 2024 itu ada 27 anak, dengan rincian 20 anak reguler dan 7 anak ABK. Sedangkan jika merujuk kepada realita di kelas itu hanya 19 anak karena ada beberapa anak yang tidak melanjutkan karena alasan tertentu dari pihak keluarga. Dan dari 7 anak ABK tersebut memiliki latar belakang masalah yang berbeda, seperti yang diketahui ada beberapa jenis Anak kebutuhan khusus. Istilah "anak berkebutuhan khusus" (ABK) kerap disalahartikan sebagai anak yang lambat atau mengalami keterbelakangan mental. Persepsi ini keliru dan perlu diluruskan. Faktanya, ABK adalah anak-anak dengan berbagai kondisi yang memengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mereka. Pada kenyataannya, ABK memiliki berbagai macam kondisi dan tingkat ketidakmampuan yang beragam. Contohnya, ABK dapat dikategorikan sebagai ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), *cerebral palsy* (CP), *down syndrome*, *Autistic Spectrum Disorder* (ASD), tunagrahita, tunadaksa, dan banyak lagi. Kesulitan belajar di sekolah merupakan salah satu ciri umum ABK, namun perlu diingat bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. (Bakhrudin All Habsy, 2024)

Anak Berkebutuhan khusus (ABK) di Sekolah Alam Banyu Belik Kedung Banteng yang berjumlah tujuh tersebut, diantaranya 2 mengalami speech delay, 2 mengalami slow learn, 1 mengalami gangguan mental, dan 2 mengalami autisme. Selama proses belajar ke tujuh anak ini masih memerlukan dampingan dari guru pendamping (*shadow teacher*). Guru pendamping

(*shadow teacher*) sendiri memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Mereka berperan sebagai teladan karakter, membantu guru kelas dalam merancang pembelajaran, membimbing kegiatan bermain yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, dan turut mengevaluasi kemajuan anak. Untuk menjalankan tugas tersebut, guru pendamping harus memiliki pemahaman mendalam tentang tumbuh kembang anak, meliputi aspek fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan agama-moral. Selain itu, mereka perlu memahami faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan anak, mampu mengidentifikasi tanda-tanda kelainan, mengenal kebutuhan gizi dan memantau kesehatan serta keamanan anak, serta memahami keunikan setiap individu. Dengan kualifikasi dan kompetensi ini, guru pendamping dapat menjadi mitra penting bagi guru kelas dan orang tua dalam mengantarkan anak mencapai potensi terbaiknya. (Nopa Wilayanita, 2023)

Implementasi kebijakan merupakan elemen penting dalam memahami kebijakan secara menyeluruh, termasuk dalam konteks pendidikan. Pemahaman komprehensif ini menjadi kunci untuk mendalami proses implementasi kebijakan pendidikan yang seringkali lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada perumusan aturan, tetapi juga pada penerapannya di lapangan. Hal ini melibatkan berbagai faktor, seperti aktor yang terlibat, sumber daya yang tersedia, dan konteks di mana kebijakan tersebut diterapkan (Yuliah, 2020, hal. 5). Implementasi kebijakan pendidikan di sekolah dasar menghadapi tantangan seperti Upaya terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik tenaga kerja maupun pendanaan. Hal ini mempersulit kelancaran operasi dan pencapaian tujuan. Selain itu, faktor lingkungan sosial dan budaya juga dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaksana kebijakan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses implementasi (Fitri & Suryadi, 2021).

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan wawancara terhadap kepala sekolah dan guru di Sekolah Alam Banyu Belik menunjukkan bahwa dari pihak sekolah telah mengkolaborasi antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka serta memodifikasi kurikulum merdeka menjadi bahan ajar bagi siswa untuk berkreasi dan mengeksplor pengetahuan melalui alam, dari pihak sekolah menamai kurikulum ini dengan "kurikulum singkong" dimana siswa inklusi lebih diberikan pembelajaran mengenai tumbuh kembang singkong atau ubi dari cara menanam, memupuk, memanen, hingga akhirnya sampai pada tahap produksi sehingga dapat menghasilkan produk sendiri dan memberikan keuntungan baik bagi sekolah maupun siswa., untuk proses produksi melalui kegiatan *cooking class* (kelas memasak) sebagai kegiatan rutin sekaligus melatih skill tiap siswa dalam melatih potensi wirausaha dan melatih kemandirian. Selain kemandirian dalam hal wirausaha kemandirian lain yang menjadi prioritas bagi siswa ABK seperti siswa belajar makan sendiri, belajar menggunakan pakaian dan lain sebagainya.

Kurikulum adaptif merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan belajar siswa yang beragam. Kurikulum ini memungkinkan adanya modifikasi dalam tujuan pembelajaran, materi, proses pembelajaran, dan evaluasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing siswa. Dengan demikian, kurikulum adaptif dapat mengakomodasi

kebutuhan semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dalam satu lingkungan belajar yang inklusif (Rudiyati, Yusuf, Mardiah, & Kurniawati, 2022). Kurikulum yang baik untuk pendidikan inklusi harus bersifat fleksibel dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan individual setiap siswa. Kurikulum fleksibel mencakup penyesuaian dalam materi, metode pembelajaran, media, dan penilaian. Hal ini bertujuan agar semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dapat mengakses kurikulum secara setara dan mencapai potensi maksimal mereka (Ismawari & Purwata, 2020). Kurikulum akomodatif merupakan kurikulum yang dirancang secara khusus untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Kurikulum ini memungkinkan adanya penyesuaian dalam tujuan pembelajaran, materi, metode, media, serta sistem evaluasi agar sesuai dengan karakteristik dan kemampuan setiap individu (Amalia & Neviyarni, 2021).

Selain itu, ditemukan bahwa program perkembangan khusus di Sekolah Alam Banyu Belik memiliki keunikan tersendiri. Sekolah Alam Banyu Belik menerapkan konsep belajar yang menyatu dengan alam. Dalam setiap proses pembelajaran, alam selalu dilibatkan sebagai media dan sumber belajar utama. Hal ini bertujuan untuk membangun kecintaan dan kepedulian siswa terhadap alam sejak dini. Kepala sekolah memaparkan bahwa siswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga diajak untuk berinteraksi langsung dengan alam, seperti mengamati lingkungan sekitar, mempelajari ekosistem, dan bercocok tanam.

Dalam program perkembangan khusus, selain mempelajari materi akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung, siswa juga dibekali dengan keterampilan hidup yang berkaitan dengan alam. Misalnya, mereka belajar cara menanam dan merawat tanaman, mengolah hasil kebun menjadi makanan sehat, serta mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan dan hewan di sekitar lingkungan sekolah. Menurut kepala sekolah, pendekatan belajar yang melibatkan alam secara langsung ini memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Mereka tidak hanya menghafal teori, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam melalui praktik langsung di alam terbuka. Selain itu, metode pembelajaran ini juga diyakini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap pelestarian lingkungan hidup sejak dini.

Dengan demikian, program perkembangan khusus di Sekolah Alam Banyu Belik tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga menekankan pada pembentukan karakter dan keterampilan hidup yang berwawasan lingkungan. Hal ini menjadi keunikan tersendiri bagi sekolah tersebut dalam mengembangkan potensi dan kecerdasan siswa secara holistik.

Berdasarkan wawancara dengan guru, terungkap bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pembelajaran inklusif. Guru menerima arahan dari kepala sekolah untuk menyesuaikan metode dan media pembelajaran dengan jenis disabilitas siswa ABK. Selain itu, guru juga harus mengawasi siswa lain untuk mencegah perundungan terhadap siswa ABK. Meskipun terdapat tantangan dalam mengelola kelas inklusif, guru bersyukur bahwa siswa reguler sudah menunjukkan sikap saling memahami dan menghargai siswa ABK. Bahkan, beberapa siswa reguler membantu teman-teman ABK mereka untuk fokus belajar dan mandiri. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penerapan pendidikan inklusif di

sekolah. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa ABK, mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

Keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung pada peran kepala sekolah sebagai pemimpin utama dan memiliki wewenang penuh atas semua program pendidikan inklusi. Melalui kebijakan-kebijakan yang tepat, kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan yang suportif bagi anak berkebutuhan khusus dan mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi dalam inklusi. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di sekolah. Kebijakan yang tepat dalam hal pengembangan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana yang sesuai, dan pengelolaan program yang efektif, menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan inklusi yang berkualitas. (Azzahra Mutia Selena, 2024)

Pendidikan inklusif menjunjung tinggi hak belajar semua anak tanpa diskriminasi. Proses belajar ini terjalin melalui kerjasama erat antara guru, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, mewujudkannya membutuhkan transformasi menyeluruh, mencakup pola pikir, penataan teknis, kebijakan, budaya, pengelolaan kelas, dan penerapan prinsip adaptasi. Prinsip adaptasi ini memiliki tiga dimensi utama, yaitu kurikuler, instruksional, dan lingkungan belajar (ekologis), yang harus diperhatikan oleh sekolah untuk mendukung kebutuhan belajar semua peserta didik. Pendidikan inklusif mengedepankan prinsip keramahan dan kehangatan untuk membangun rasa nyaman bagi seluruh peserta didik, terlepas dari latar belakang atau kondisi mereka. Pendidik dan tenaga kependidikan pun harus memiliki keragaman latar belakang dan kemampuan agar dapat memahami kebutuhan belajar yang berbeda-beda. (Rahman, 2023)

Dengan demikian, Pendidikan inklusif memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau kebutuhannya, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini memungkinkan mereka untuk belajar, berkembang, dan mencapai potensi terbaiknya dalam lingkungan yang aman dan suportif.

Adanya program-program pendidikan inklusi yang telah dijelaskan pasti dalam menjalankannya terdapat kendala dan tantangan yang dialami oleh Sekolah Alam Banyu belik ini. Berikut adalah temuan mengenai kendala yang dialami saat menjalankan program pendidikan inklusi tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Kesiapan sumber daya manusia

Pendidikan inklusi dihadapkan pada berbagai rintangan, salah satu yang paling krusial adalah kesiapan guru dan tenaga kependidikan dalam menangani keberagaman siswa, terutama siswa dengan kebutuhan khusus. Dibutuhkan pelatihan dan pendampingan khusus agar guru memiliki kompetensi dan strategi mengajar yang tepat untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam.

2. Sarana dan prasarana pendukung

Implementasi pendidikan inklusi memerlukan sarana dan prasarana yang aksesibel dan ramah terhadap kebutuhan khusus siswa, seperti fasilitas bagi siswa penyandang disabilitas. Keterbatasan sarana dan prasarana dapat menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

3. Penerimaan dan sikap masyarakat

Kendala lain yang mungkin dihadapi adalah penerimaan dan sikap masyarakat terhadap konsep pendidikan inklusi. Masih ada stigma dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan inklusi, sehingga dapat menghambat pelaksanaannya.

4. Kebijakan

Walaupun landasan hukum untuk pendidikan inklusi di Indonesia telah ada, penerapannya di berbagai daerah masih belum merata. Implementasi kebijakan ini di beberapa daerah mungkin belum maksimal atau infrastrukturnya belum memadai. Hal ini melatari keberadaan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) yang mengatur kemudahan dalam pembentukan dan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas.

Oleh karena itu penulis memberikan sedikit saran dan solusi terkait kendala yang dihadapi di Sekolah Alam Banyu Belik ini dengan beberapa saran yaitu seperti: (1) Untuk mengatasi kendala kesiapan sumber daya manusia, penting bagi sekolah untuk mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk upaya pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai peningkatan kompetensi mereka dalam menangani keberagaman siswa, khususnya siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, sekolah juga dapat menyediakan pendampingan dan bimbingan dari tenaga ahli atau profesional di bidang pendidikan inklusi, serta menjalin kemitraan dengan lembaga atau organisasi yang fokus pada pendidikan inklusi untuk mendapat dukungan teknis dan sumber daya. (2) Dalam hal sarana dan prasarana pendukung, sekolah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan fasilitas yang aksesibel bagi siswa berkebutuhan khusus. Penyesuaian dan modifikasi pada fasilitas sekolah juga perlu dilakukan agar lebih ramah terhadap kebutuhan khusus siswa. Selain itu, sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran yang dapat membantu siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar. (3) Untuk meningkatkan penerimaan dan sikap masyarakat terhadap pendidikan inklusi, sekolah dapat melakukan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi. Melibatkan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan orang tua dalam proses implementasi juga penting dilakukan. Sekolah juga dapat menunjukkan contoh keberhasilan dan manfaat dari pendidikan inklusi untuk menghapus stigma negatif di masyarakat. (4) Terkait dengan kebijakan, sekolah dapat melakukan advokasi dan lobi kepada pemerintah daerah untuk memastikan implementasi kebijakan pendidikan inklusi secara konsisten. Sekolah juga dapat membentuk unit layanan disabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (3) dan (4) untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusi. Selain itu, sekolah dapat mengupayakan alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah.

D. Kesimpulan

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pembelajaran. Konsep ini sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang menjunjung

akses pendidikan tanpa diskriminasi. Di Indonesia, implementasi pendidikan inklusif didasari oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32, yang memberikan kesempatan kepada ABK untuk belajar bersama anak-anak reguler lainnya secara setara.

Sekolah Alam Banyu Belik menerapkan konsep pendidikan inklusif dengan mengintegrasikan kurikulum 2013, kurikulum merdeka, dan kurikulum adaptif yang disebut "kurikulum singkong". Program ini melibatkan alam sebagai media dan sumber belajar utama, serta mengembangkan keterampilan hidup yang berwawasan lingkungan. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, penerimaan dan sikap masyarakat, serta kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung.

Berikut beberapa strategi yang efektif untuk menangani kendala tersebut meliputi, pelatihan dan pendampingan guru, pengadaan fasilitas aksesibel, sosialisasi kepada masyarakat, advokasi kebijakan, dan pembentukan unit layanan disabilitas. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kompetensi guru dalam menangani keberagaman kebutuhan belajar siswa, serta kerjasama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Secara keseluruhan, pendidikan inklusif membutuhkan transformasi menyeluruh, meliputi pola pikir, penataan teknis, kebijakan, budaya, pengelolaan kelas, dan penerapan prinsip adaptasi kurikuler, instruksional, serta lingkungan belajar yang ramah bagi semua peserta didik.

E. Daftar Pustaka

- Ahlan Syaeful Millah, A. D. (2023). Analisis Data dalam penelitian tindakan kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 2, 7.
- Amalia, R., & Neviyarni, S. (2021). Pengembangan Kurikulum Akomodatif dalam Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 5(1), 167-182.
- Azzahra Mutia Selena, F. H. (2024). Kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Journal of Creative and Innovative Research*, 1.
- Bakhrudin All Habsy, M. H. (2024). *Identifikasi Kesulitan Belajar Pada Anak Berkebutuhan Khusus*. 4, 9.
- Budi Utomo, N. A. (2024). Pendidikan inklusi persepektif pendidikan islam. *Mamba'ul Ulum*, 4, 110.
- Elsa Agustina, M. Z. (2023, Januari). kemampuan literasi numerasi siswa disekolah inklusi. *Jurnal program studi pendidikan matematika*, 2.
- Fitri, N., & Suryadi, B. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan: Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Kota Semarang . *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 37-47.
- Fransiska Angelina Dhoka, F. P. (2023). *Pendidikan inklusi sebagai upaya mengatasi permasalahan sosial anak berkebutuhan khusus*. 1, 5.

- Ismawari, M., & Purwata, E. (2020). Kurikulum Fleksibel untuk Pendidikan Inklusi: Sebuah Kajian KOnseptual. *Jurnal Kajian Pendidikan Inklusi*, 98- 112.
- Nazar, F. L. (2020, juli). pentingnya pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. 12, 7.
- Nopa Wilayanita, S. H. (2023). Efektifitas Peran Guru Pendamping (Shadow Teachear) Anak Hiperaktif Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 2.
- Rahman, S. S. (2023, May). *Prinsip impelementasi dan kompetensi guru dalam pendidikan inklusi*. Ilmu pendidikan nonformal, 09, 3.
- Rudiyati, S., Yusuf, M., Mardiah, A., & Kurniawati, F. (2022). Pengembangan Kurikulum Adaptif untuk Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 1-16.
- Supena, A. (2023). *Implementasi program pendidikan inklusi pada sekolah dasar di kota serang sastra wijaya* 1. 9, 2.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *At-Tadbir Media Hukum dan Pendidikan*, 30, 5.